

KEMAMPUAN NEGOSIASI ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEREBUTAN POSISI PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN PANGANDARAN

Acep Ridwan Maulana¹, Riksa Iqomah²

Manajemen Pendidikan Islam STIT NU AL-Farabi Pangandaran^{1,2}

E-mail : acepridwan@stitnualfarabi.ac.id

riksaiqomah@stitnualfarabi.ac.id

ABSTRACT

The focus of this study aims to analyze negotiation techniques carried out by student organizations in the fight for election organizer positions in Pangandaran Regency. This research uses qualitative methods with a participatory research approach, or commonly called Participatory Research Method on several student organizations involved in the fight for positions in elections in Pangandaran Regency. The results showed that there are several factors that influence the occurrence of conflict, such as differences in vision and mission, political competition, differences in strategic approaches, and differences in interests. This conflict dynamic can affect the existence of student organizations, but it can also be an opportunity for organizational growth and development.

Key Words: *Conflict Management, Community Elections, Student Organization.*

ABSTRAK

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik negosiasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian partisipatif, atau yang biasa disebut Participatory Research Method terhadap beberapa organisasi mahasiswa yang terlibat dalam perebutan posisi pada pemilu di Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik, seperti perbedaan visi dan misi, persaingan politik, perbedaan pendekatan strategi, dan perbedaan kepentingan. Dinamika konflik ini dapat memengaruhi eksistensi organisasi mahasiswa, namun juga dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan organisasi.

Kata Kunci: *Manajemen Konflik, Pemilihan Umum, Organisasi Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Organisasi mahasiswa menjadi salah satu tempat berkumpul dan bertukar pikiran bagi mahasiswa di luar kampus tempat mereka mengambil studi. Ragam organisasi mahasiswa dibedakan berdasarkan aliran ideologi, faksi agama, serta perbedaan peminatan para anggotanya.

Seiring berjalannya waktu, organisasi mahasiswa dituntut untuk bisa menemukan sekaligus mendorong minat dan bakat yang dimiliki setiap anggotanya. Semakin banyak kader yang bisa bersinar, semakin bagus nilai organisasi tersebut, baik di mata mahasiswa, kampus, bahkan sampai ke Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu momentum pembuktian segenap organisasi mahasiswa. Peran organisasi mahasiswa dalam mendistribusikan kadernya sebagai penyelenggara pemilu terbilang cukup sentral. Cara ini menjadi salah satu opsi bagi organisasi mahasiswa dalam memberdayakan setiap anggotanya. (Fatyandri et al., 2022)

Untuk bisa mewujudkan distribusi kader yang optimal, dibutuhkan teknik diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi dari setiap organisasi mahasiswa. Banyaknya minat masyarakat, organisasi keagamaan bahkan aparat desa dalam perebutan posisi badan adhoc pemilu membuat persaingan menjadi semakin menarik.

Di Kabupaten Pangandaran, nyaris di setiap tingkatan badan adhoc terdapat penempatan kader dan/atau alumni organisasi mahasiswa didalamnya. Hal itu dimulai dari tingkatan TPS, Desa, Kecamatan dan bahkan Komisioner KPU atau Bawaslu itu sendiri. Selain eksistensi organisasi, perebutan posisi badan adhoc ini juga menjadi ajang untuk membuktikan kemampuan negosiasi bagi setiap kader secara individu maupun organisasi mahasiswa itu sendiri.

Fokus penelitian bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi antar organisasi mahasiswa di Kabupaten Pangandaran dalam mempertahankan eksistensinya. Peneliti juga menelaah teknik negosiasi yang digunakan untuk tercapainya tujuan organisasi mahasiswa tersebut, utamanya dalam hal perebutan posisi badan adhoc penyelenggara pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian partisipatif, atau yang biasa disebut Participatory Research Method. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam proses penelitian itu sendiri.

Ada beberapa langkah yang biasanya diambil dalam metode penelitian partisipatif,

1. Identifikasi masalah. Peneliti bersama dengan subjek penelitian mengidentifikasi

- masalah yang akan diteliti.
2. Perencanaan Penelitian: Peneliti dan subjek penelitian merencanakan bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk metode pengumpulan data dan analisis data.
 3. Pengumpulan Data: Subjek penelitian aktif terlibat dalam proses pengumpulan data. Mereka bisa melakukan wawancara, survei, atau metode pengumpulan data lainnya.
 4. Analisis Data: Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Subjek penelitian juga dilibatkan dalam proses ini.
 5. Tindakan: Hasil penelitian kemudian digunakan untuk melakukan tindakan yang dapat memecahkan masalah yang diidentifikasi. (Nazir, 2009)
- Di Kabupaten Pangandaran, terdapat dua organisasi mahasiswa yang saling berhadapan dalam dinamika perebutan posisi penyelenggara pemilu. Keduanya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Keduanya banyak mendistribusikan kadernya di berbagai level badan adhoc dengan kuantitas yang saling bersaing. Diluar organisasi mahasiswa, terdapat pula beberapa organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lain yang turut bersaing dalam posisi ini.
- Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, penyelenggaraan pemilu memerlukan kontribusi banyak orang untuk tergabung kedalam penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu sendiri terdiri dari tiga badan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). KPU dan Bawaslu memiliki badan adhoc yang secara struktural terdiri dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Di Kabupaten Pangandaran, terdapat dua organisasi mahasiswa yang saling berhadapan dalam dinamika perebutan posisi penyelenggara pemilu. Keduanya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Keduanya banyak mendistribusikan kadernya di berbagai level badan adhoc dengan kuantitas yang saling bersaing. Diluar organisasi mahasiswa, terdapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa Terjadi Perebutan Posisi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Antar Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Pangandaran?

pula beberapa organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lain yang turut bersaing dalam posisi ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, penyelenggaraan pemilu memerlukan kontribusi banyak orang untuk tergabung kedalam penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu sendiri terdiri dari tiga badan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). KPU dan Bawaslu memiliki badan adhoc yang secara struktural terdiri dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Sari et al., 2023)

Penempatan kader dan alumni dalam jabatan publik juga akan menjadi nilai tambah bagi kredibilitas organisasi. Hal ini akan mempengaruhi minat mahasiswa di kampus dalam menentukan pilihan organisasinya. Semakin baik distribusi kader, akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi tersebut dan terus bertumbuh didalamnya. (Inggar Saputra & Firdaus, 2023)

Selain kredibilitas, keuntungan lain yang didapatkan organisasi mahasiswa apabila anggotanya menjadi bagian dari badan adhoc ialah adanya tambahan dana kas organisasi. Dana kas ini berasal dari iuran anggota organisasi yang terpilih menjadi badan adhoc. Tak ayal, semua organisasi berlomba-lomba untuk mendistribusikan kader-kader

terbaiknya untuk mencapai jabatan tersebut.

Keuntungan lain yang didapat ialah meningkatnya kredibilitas organisasi di hadapan mahasiswa. Nantinya, minat mahasiswa untuk bergabung menjadi anggota organisasi akan semakin tinggi. Pada akhirnya, nama organisasi mahasiswa akan semakin dikenal dan diperhitungkan di lingkungan kampus.

B. Dinamika Konflik Yang Terjadi Antar Organisasi Mahasiswa Dalam Perebutan Posisi Pada Pemilu di Kabupaten Pangandaran Dalam Mempertahankan Eksistensinya

Dalam menyongsong pemilu 2024, penting bagi organisasi mahasiswa di Kabupaten Pangandaran untuk memperhatikan dinamika konflik yang terjadi. Melalui penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, organisasi mahasiswa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berikut langkah tepat yang dapat dilakukan: (Helmi, 2018)

1. Komunikasi dan Dialog:

Penting bagi organisasi mahasiswa untuk menjalin komunikasi yang baik antara anggota-anggota organisasi. Dengan melakukan dialog secara terbuka dan transparan, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan

baik dan konflik dapat diminimalisir.

2. Konsolidasi Internal:

Organisasi mahasiswa perlu memperkuat konsolidasi internal dengan membangun kebersamaan dan solidaritas di antara anggota. Melalui kegiatan-kegiatan yang memperkuat ikatan antar anggota, organisasi dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

3. Pembagian Tugas yang Jelas:

Penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota organisasi dapat fokus pada tanggung jawab mereka masing-masing, mengurangi potensi konflik yang timbul karena tumpang tindih atau ketidakjelasan peran.

4. Membangun Kemitraan dan Aliansi:

Organisasi mahasiswa dapat membangun kemitraan dan aliansi dengan organisasi lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Dengan bekerja sama dan berkolaborasi, organisasi dapat memperkuat posisinya dalam perebutan posisi pada pemilu, sambil mengurangi potensi konflik dengan organisasi lain.

5. Mengedepankan Etika dan Nilai-Nilai Demokrasi:

Penting bagi organisasi mahasiswa untuk mengedepankan etika dan nilai-nilai demokrasi dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan menghormati perbedaan pendapat, mengedepankan prinsip keadilan, dan mengutamakan kepentingan bersama, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi potensi konflik.

6. Mendorong Partisipasi Aktif:

Organisasi mahasiswa dapat mendorong partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan, organisasi dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan.

7. Mengutamakan Dialog Damai:

Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, penting untuk mengutamakan dialog damai sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan berbicara secara terbuka, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi bersama, konflik dapat diatasi dengan lebih baik.

8. Menghindari Provokasi dan Penggunaan Kekerasan:

Organisasi mahasiswa harus menghindari provokasi dan penggunaan kekerasan dalam perebutan posisi pada pemilu. Penggunaan kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan memicu konflik yang lebih besar. Sebaliknya, berfokuslah pada pendekatan yang damai dan konstruktif.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi pada pemilu di Kabupaten Pangandaran diantaranya yaitu perbedaan visi dan misi. Konflik dapat terjadi ketika organisasi mahasiswa memiliki perbedaan visi dan misi yang mendasar. Perbedaan ini dapat mengarah pada perselisihan tentang arah dan tujuan organisasi, yang pada gilirannya dapat memicu konflik antar organisasi. Selanjutnya persaingan politik. Perebutan posisi pada pemilu sering kali menciptakan persaingan politik antar organisasi mahasiswa. Persaingan ini dapat memicu konflik karena organisasi saling berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dan pengaruh politik. Lalu perbedaan pendekatan strategi. (Yusrin & Salpina, 2023) Organisasi mahasiswa dapat memiliki pendekatan strategi yang berbeda dalam perebutan posisi pada pemilu. Perbedaan pendekatan ini dapat memicu konflik karena organisasi memiliki pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Dan terakhir yaitu perbedaan kepentingan. Konflik dapat muncul ketika organisasi mahasiswa memiliki kepentingan yang berbeda dalam perebutan posisi pada pemilu. Perbedaan ini dapat mencakup kepentingan politik, kepentingan sumber daya, atau kepentingan lainnya yang dapat

bertentangan satu sama lain. (Sarofah, 2023)

Dinamika konflik antar organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi pada pemilu di Kabupaten Pangandaran dapat beragam. Konflik dapat berlangsung dalam bentuk persaingan terbuka, konfrontasi verbal, atau bahkan konflik yang lebih tersembunyi. Namun, dinamika konflik ini juga dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Konflik dapat mendorong organisasi untuk mencari solusi yang inovatif, memperkuat hubungan internal, dan meningkatkan kapasitas organisasi. (Saw, 1997)

C. Teknik Negosiasi yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan Organisasi Mahasiswa dalam Perebutan Posisi Penyelenggara Pemilu

Negosiasi merupakan proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik negosiasi untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa perlu menggunakan teknik negosiasi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Teknik negosiasi yang digunakan haruslah efektif dan menguntungkan bagi semua pihak yang

terlibat. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik negosiasi yang digunakan oleh organisasi mahasiswa, seperti tawar-menawar, memberikan kompromi, menggunakan mediasi, menggunakan teknik win-win, menggunakan teknik "batas waktu", menggunakan teknik "menggunakan kekuatan", dan lain sebagainya. Teknik-teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Berikut penjelasannya:

1. Tawar-menawar (bargaining):

Teknik ini merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam negosiasi. Para pihak akan saling memberikan tawaran harga atau kondisi tertentu dan akan terus melakukan pertukaran hingga mencapai kesepakatan yang sesuai. Dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terkait alokasi posisi atau dukungan politik.

2. Memberikan kompromi (compromise):

Teknik ini mencakup para pihak yang bersedia untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain dengan syarat pihak lain juga harus memberikan sesuatu yang diinginkannya. Dalam konteks perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik memberikan

kompromi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Menggunakan mediasi:

Mediasi adalah teknik negosiasi dimana para pihak menggunakan seorang mediator untuk membantu menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan yang sesuai. Mediator adalah seseorang yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik tapi membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai. Dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik mediasi untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang adil.

4. Menggunakan teknik Win-Win:

Teknik ini mencakup para pihak yang berusaha mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Dalam konteks perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik win-win untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak dan memperkuat hubungan antarorganisasi.

5. Menggunakan teknik "Batas waktu" (limited time offer):

Teknik ini mencakup para pihak yang memberikan batas waktu bagi pihak lain untuk menerima tawaran yang diberikan. Batas waktu ini biasanya digunakan untuk

memberikan tekanan kepada pihak lain agar segera mencapai kesepakatan. Dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu, organisasi mahasiswa dapat menggunakan teknik batas waktu untuk mencapai kesepakatan dengan efisien.

6. Menggunakan teknik "Menggunakan kekuatan" (using power):

Teknik ini mencakup para pihak yang menggunakan kekuatan, seperti posisi, uang, atau kewenangan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menerima tawaran yang diberikan. Namun, penting untuk menggunakan kekuatan dengan bijaksana dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu. Dengan teknik negosiasi tersebut diharapkan hasil kesepakatan yang dibuat tidak hanya menguntungkan pihak sendiri, melainkan semua pihak yang terlibat, agar konflik yang ada dapat diselesaikan. Konflik dapat diselesaikan dengan baik antar individu yang terlibat dalam konflik dan juga bantuan serta mediasi oleh pihak ketiga. Pihak berkonflik harus bisa dengan berkomunikasi secara baik dan menjelaskan masing-masing kepentingan dalam bernegosiasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan saling menerima pendapatan yang lain agar bisa menyelesaikan suatu

konflik tersebut. (M. Hkikmat, 2022)

KESIMPULAN

Konflik antar organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi pada pemilu di Kabupaten Pangandaran dapat mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut. Faktor-faktor seperti perbedaan visi dan misi, persaingan politik, perbedaan pendekatan strategi, dan perbedaan kepentingan memainkan peran penting dalam memicu konflik. Dinamika konflik ini dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan organisasi jika ditangani dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi organisasi mahasiswa untuk memahami dinamika konflik ini dan mencari cara untuk mengelola konflik secara konstruktif guna mempertahankan eksistensi mereka dalam perebutan posisi pada pemilu di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatyandri, A. N., Chanada, E., Riady, F., Salim, K., Nicholas, V., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Batam, U. I. (2022). Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi yang Baik dan Tepat dalam Dunia Industri Makanan dan Minuman. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 436–440. <https://doi.org/10.37531/yume.vxi.x.324>
- Helmi, R. (2018). Peran Mahasiswa

- dalam. *Ppa Ums, April*, 1–7.
- Inggar Saputra, & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millenial Dalam Politik : Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 129–136. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582>
- Ipan Nurhidayat. (2023). Marketing Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 53–63. Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/6>
- M. Hkikmat, M. (2022). Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.141>
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Sari, D. W., Maksudin, M., Sibawaihi, S., & Putri, A. M. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Identitas Islam Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 980. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.985-989>
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219>
- Saw, M. (1997). *Peran Mahasiswa Kesehatan*.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>